



► **POLEMIK APARTEMEN BALIREJO**

Sidang Amdal Dipersoalkan

JOGJA—Protes warga Balirejo, Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Jogja terhadap pembangunan apartemen di wilayah mereka memasuki episode baru. Kali ini mereka menilai sidang Komite Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jogja menyalahi prosedur.

Abdul Hamid Razak dan Sunartono
redaksi@harianjogja.com

Warga menilai sidang tersebut maladministratif. Paslanya, sidang yang digelar di sebuah hotel yang berada di Jl. Timoho, Jogja itu tidak melibatkan warga yang terdampak langsung pembangunan apartemen. "Kelima warga yang ikut sidang tidak merepresentasikan suara warga selama ini. Mereka [warga] yang ikut sidang tidak mewakili warga," kata Ketua RW 5 Balirejo, Dono-Susilo, Sabtu (24/11).

Dia menegaskan seluruh warga tetap solid menolak pembangunan apartemen tersebut. Penolakan warga terhadap pembangunan apartemen itu, kata Dono, selama ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah akses lalu lintas sekitar Balirejo yang terancam macet.

● Lebih Lengkap Halaman 16

► Sidang amdal apartemen di Balirejo dinilai maladministratif karena tak melibatkan warga.

► PHRI yakin semua pengembang pasti mengutamakan ketaatan prosedural perizinan.

Sidang Amdal...

Sekadar diketahui, penolakan warga terhadap apartemen di wilayah Balirejo sudah terjadi sejak 2015 silam. Dokumen amdal perusahaan pengembang dinilai tak sah lantaran warga menganggap belum pernah memberikan persetujuannya.

Kepala DLH Jogja Suyana mengklaim jika Sidang Komite Amdal sudah digelar sesuai prosedur. Menurut Suyana, keluhan sudah memediasi masalah tersebut sehingga muncul nama-nama warga yang mengikuti Sidang Komite Andal. "Lagipula nama-nama warga yang ikut sidang,

bukan permintaan kami tetapi muncul atas nama warga sendiri," kata dia.

Konflik antara warga dan pengelola apartemen/hotel kerap terjadi di DIY, terutama di wilayah-wilayah seperti Jogja dan Sleman. Faktor pemicunya pun beragam, mulai dari masalah sosialisasi, dampak lingkungan dan sosial, hingga belum lengkapnya proses perizinan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mendorong masyarakat proaktif mengawasi

keengkapan perizinan pembangunan hotel dan apartemen agar tidak terjadi penyelewengan. "Di sini banyak hotel. Enggak tahu sudah bener atau belum perizinannya. Awasi itu," ujarnya, Jumat (23/11).

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istidjab Danunagoro mengaku sepakat.

Proses perizinan hotel memang harus diawasi agar segala pelaksanaan perhotelan sesuai prosedur. "Memang masih ada izin yang disalahgunakan," kata dia.

4



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005